

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cenderung meningkat di sektor industrinya. Sejalan dengan meningkatnya perekonomian, dunia bisnis pun menjadi semakin bertambah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditunjang dari adanya peningkatan dari berbagai macam sektor industri .Salah satunya adalah sektor industri energi dan migas. Dalam sektor ini tak sedikit perusahaan yang bergerak pada bidang tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut terutama BUMN harus bertanggung jawab mengenai laporan keuangan yang disajikan kepada *stake holder*, karena laporan keuangan merupakan proses akhir dari periode akuntansi yang biasaya disajikan pada tanggal 31 Desember dan hasil akhirnya digunakan sebagai laporan serta memberikan informasi kepada pemakai agar pengambilan keputusan kebijakan ekonomi dapat sesuai dengan sasaran dan memenuhi target dimasa yang mendatang.

Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam perusahaan, bagaimana kondisi perusahaan dengan melihat catatan historis mengenai transaksi yang dilakukan perusahaan berjalan selama satu tahun periode kebelakang, memperlihatkan posisi finansial perusahaan, laba rugi perusahaan tersebut. Laporan keuangan harus dibuat secara relevan dan *reliable* agar dapat menyajikan keadaan perusahaan yang sebenar-benarnya. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP. SAK sendiri full diadopsi diIndonesia sejak tahun 2007.Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan

laporan keuangan, memudahkan auditor serta Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Terdapat 47 jenis PSAK salah satunya adalah PSAK.30 dimana PSAK.30 tersebut membahas mengenai kegiatan sewa-menyewa.

Sewa dalam PSAK 30 dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu, yaitu dari pihak *lessee* dan *lessor*. Kedua kategori tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Klasifikasi sewa dari pihak *lessee* terdiri dari *Finance Lease* dan *Operating Lease*. Sedangkan dari pihak *lessor* terdiri dari *Sales Type Lease*, *Direct Financing Lease*, *Leverage Lease*, dan *Operating Lease*.

Pengakuan dan pencatatan akuntansi sewa harus konsisten dengan standar yang berlaku yaitu, PSAK No.30 dengan itu perusahaan tidak akan salah dalam penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dan mengetahui sumber-sumber ekonomi yang diperoleh perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dapat merubah sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Dalam melakukan pencatatan akuntansi dikenal dengan dua metode yaitu secara *cash basis* dan *accrual basis*.

PT.PERTAMINA (PERSERO) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan minyak dan gas bumi yang dinaungi oleh pemerintah atau bisa disebut dengan perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang langsung diawasi oleh pemerintah yang dalam prakteknya telah melakukan kegiatan *finance lease* sejak tahun 2010 dan mencatat dengan sistem komputer yang bernama My.Sap serta dalam pengakuan dan pencatatan tersebut harus konsisten menggunakan dasar PSAK.No.30, dampak yang terjadi jika tidak melakukan penyusunan laporan keuangan dengan pedoman tersebut maka akan terjadi salah penyajian dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, pengakuan dan pencatatan sesuai dengan PSAK.No.30 merupakan standar dalam melakukan posting ke laporan keuangan serta memudahkan perusahaan dalam membedakan kegiatan *finance lease* dan *operating lease*. Sebab dengan melakukan pengakuan dalam mencatat jenis sewa dapat mengetahui jumlah kebutuhan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, saya tertarik untuk melakukan peninjauan lebih dalam terkait pengakuan dan pencatatan sewa pembiayaan yang harus

konsisten dengan pedoman dan prosedur PSAK.No.30 beserta pengungkapan pada laporan keuangan PT.PERTAMINA (PERSERO) kantor pusat yang didapat dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan hasil dari peninjauan tersebut akan digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan PSAK 30 Atas Pengakuan, Pencatatan, Pengungkapan Sewa Pembiayaan Dalam Laporan Keuangan PT.Pertamina (Persero).**

## **I.2 Ruang Lingkup dan Batasan**

Kegiatan sewa guna usaha di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dan memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh barang modal dan menambah modal kerja. Untuk itu saya membatasi ruang lingkup penulisan mengenai sewa pembiayaan (*finance Lease*) sesuai dengan pembahasan yang terdapat di PSAK.No.30 sebagai berikut :

1. Jenis sewa guna usaha
2. Perlakuan akuntansi sewa di PT.Pertamina (Persero).
3. Pengakuan, pencatatan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh penyewa guna usaha sesuai dengan PSAK 30.
4. Laporan Keuangan.

## **I.3 Tujuan**

### **I.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penyusunan penulisan Tugas Akhir ini mengetahui penerapan, dalam pencatatan dan pengungkapan pada laporan keuangan kegiatan sewa guna usaha jenis sewa pembiayaan (*Finance Lease*) sesuai dengan PSAK.No. 30 di PT. PERTAMINA (PERSERO).

### **I.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui visibilitas mengenai konsistensi penerapan PSAK.No.30 di PT.Pertamina (Persero), dan memiliki standar untuk melakukan pengakuan, pencatatan, dan pengkalsifikasian jenis sewa tersebut sesuai dengan standar PSAK.No.30 selanjutnya mengidentifikasi dengan membandingkan apakah terdapat perbedaan pencatatan serta perlakuan dari teori yang penulis ambil, yang kemudian menjadi dasar

penilaian dengan yang dibuat oleh perusahaan berikut dengan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standart yang berlaku umum.

#### **I.4 Sejarah Organisasi**

Sejarah berdirinya PT.PERTAMINA sebagai perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) sejak tahun 1957 hingga berubah status hukum menjadi perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO).

##### **Tahun 1957**

Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

##### **Tahun 1971**

Selanjutnya, melalui UU No.8 tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU No.22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha.

##### **Tahun 2003**

Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

##### **Tahun 2006**

Pada 20 Juli 2006, PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan. PT. Pertamina (Persero) mengubah visi Perusahaan yaitu, "Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia" pada 10 Desember 2007.

## **Tahun 2016**

Pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN No. S-690/MBU/11/2016, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina terkait dengan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang Direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PT.Pertamina (Persero) memiliki 27 anak Perusahaan, 5 Perusahaan Asosiasi, dan 1 Perusahaan Joint Venture.

Perusahaan memiliki visi misi guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan yaitu,

**Visi :** *“Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”*

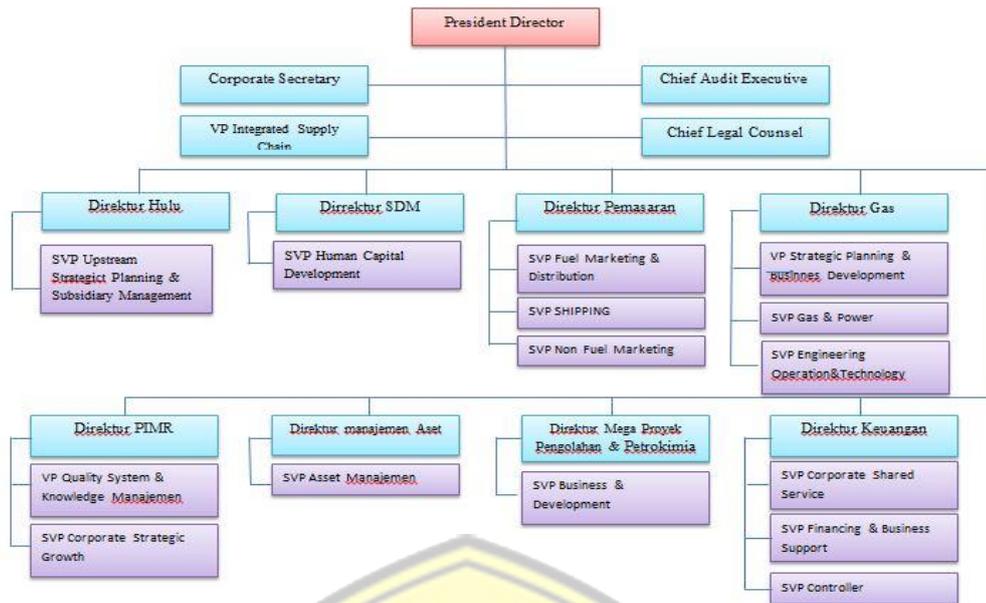
**Misi :** *“Menjalankan Usaha Minyak, Gas, Serta Energi Baru dan Terbarukan Secara Terintegrasi, Berdasarkan Prinsip-Prinsip Komersial Yang Kuat”*

Untuk mencapai sebuah visi misi tersebut Pertamina memiliki tujuan dalam perseroan yang diatur dalam PP. Nomor 31 tujuan didirikannya PT.PERTAMINA (PERSERO) yaitu :

1. Maksud Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana maksud dalam pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi tersebut.
2. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien
3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## **I.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi PT.Pertamina (Persero) per 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SO tanggal 5 Oktober 2017



Gambar 1: Struktur Organisasi PT.Pertamina (Persero)

### I.5.1 Bagan Organisasi General Accounting PT.PERTAMINA (PERSERO)

Berikut adalah skema bagan departemen Keuangan *Divisi Controller* :



Gambar 2: Struktur Organisasi departemen General Accounting

Tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasi PT.PERTAMINA (PERSERO) di bagian *General Accounting* adalah sebagai berikut :

#### a. *Manager Gneral accounting*

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi proses aktivitas *inventory management*, aktivitas dan kepatuhan perpajakan terkait biaya *deductible & non-deductible expenses* untuk transaksi pembayaran pajak, pengelolaan

data *asset* tetap, langkah tindak lanjut terhadap pengelolaan data *asset* tetap, penjurnalan akun ke *general ledger*, *review* terhadap penjurnalan di *general ledger* terkait akun-akun *fixed asset*, *asset under construction* (AUC), *general inventory*, *investment* kepada entitas anak perusahaan & *joint venture*, *cash/bank/deposits*, sekuritas, *other assets*, *long term loans*, *goodwill*, *deffered charges*, *revenues & expenses* kantor pusat, dan akun aset, *working advance* dan *penjualan LNG*, penyajian laporan keuangan lalu lintas devisa, dan utang luar negeri untuk Bank Indonesia, sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku dalam rangka menyajikan transaksi keuangan yang akurat.

**b. Assistant Manager General Ledger Accounting**

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan analisa kewajaran saldo GL *Account*, penjurnalan, pelaporan akun, penyusunan *disclosure* laporan keuangan, penyusunan pedoman dan perbaikannya, laporan penyusunan alokasi biaya *overhead*, *review* dan analisa realisasi biaya administasi & umum, pembukuan biaya umum dan pendapatan lain-lain, analisa dan verifikasi biaya *deductible & non-deductible expenses* untuk keperluan laporan pajak, pengelolaan akun untuk keperluan *mappingservice & material master*, penilaian KPI Akurasi Laporan Keuangan, Penetapan parameter KPI Utilisasi ERP dan tabel materialitas, Penyelesaian dan antisipasi *backlog*, penghapusan *investment*, *goodwill* dan *deferred charges*, rekonsiliasi *revenues & expenses*.

**c. Junior Officer Non-Cash Expenses & Extra-Ordinary Items Accounting.**

Melakukan persiapan dokumen bukti transaksi, analisa nilai kewajaran dan verifikasi kesesuaian dokumen bukti transaksi kepada *user*, identifikasi penjurnalan dan *request* penjurnalan, monitoring ketepatan, persiapan dan *request* koreksi penjurnalan, penyiapan *disclosure* akun dan penyusunan laporan akun terkait transaksi imbalan kerja pekerja / PSAK 24, transaksi *Deffered Charges* dan *Extraordinary Items*, *accruals* insentif, bonus, tantiem dan THR, *Inter Company* dan perwakilan Pertamina Asia Timur (Tokyo), laporan penyusunan alokasi biaya *overhead*, *review* dan analisa

realisasi biaya administrasi & umum, analisa dan verifikasi biaya *deductible & non-deductible expenses* untuk keperluan laporan pajak, penyusunan RKAP, realisasi anggaran, laporan kegiatan.

**d. *Officer Investment & Other Assets Accounting***

Melakukan persiapan dokumen bukti transaksi, analisa nilai kewajaran dan verifikasi kesesuaian dokumen bukti transaksi kepada *user*, identifikasi penjurnalan dan *request* penjurnalan, monitoring ketepatan, persiapan dan *request* koreksi penjurnalan, penyiapan *disclosure* akun dan penyusunan laporan akun, penyusunan pedoman dan perbaikannya terkait *other assets*, *Goodwill*, *investment* Anak Perusahaan & *joint venture*, sekuritas pada saat akuisisi, penerimaan *dividend* dan divestasi, penyimpanan dan pengadministrasian saham dan surat berharga, *physical check* atas saham dan surat berharga.

**e. *Assistant Manager Fixed Assets & Material Inventory Accounting***

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan analisa penambahan dan proses kapitalisasi *fixedasset* baru, pemutakhiran data dan perhitungan nilai *fixedasset*, melakukan evaluasi administrasi terhadap usulan optimalisasi dan penghapusan *fixedasset* dan *inventory material non-hydro* sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta penyusunan laporan dan *disclosure* atas seluruh *fixedasset*, AUC dan *inventory material non-hydro* milik PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan, penyusunan pedoman dan perbaikannya, penjurnalan, koreksi terhadap penjurnalan, pengelolaan akun terkait *inventory material non-hydro* perusahaan, *physical check fixed asset* termasuk sertifikat aset tanah.

**f. *Senior Supervisor Fixed Assets & Disposal Accounting***

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan analisa penambahan dan proses kapitalisasi *asset* baru, pemutakhiran data dan perhitungan nilai *asset*, melakukan evaluasi administrasi terhadap usulan optimalisasi dan penghapusan *asset* sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,serta penyusunan laporan dan *disclosure* atas seluruh *aset* dan AUC PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan, penyusunan pedoman dan perbaikannya, penjurnalan, koreksi terhadap penjurnalan, pengelolaan

akun terkait aset tetap, physical check aset tetap termasuk sertifikat aset tanah.

**g. *Junior Analyst Material Inventory***

Melakukan analisa terhadap usulan penghapusan, monitoring dan evaluasi nilai dan *physical stock check inventory material non-hydro*, persiapan dokumen, analisa nilai kewajaran saldo GL Material, identifikasi penjurnalan dan *request* penjurnalan terkait deadstock, *request* koreksi penjurnalan terkait akun deadstock dan pencadangannya, penyusunan laporan dan disclosure terkait dengan seluruh akun *inventory material non-hydro* PT Pertamina (Persero).

**h. *Assistant Manager Long-term Liabilities Accounting***

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait pencatatan akun-akun hutang jangka panjang perusahaan yang meliputi penerbitan instrumen hutang jangka panjang, biaya penerbitan hutang jangka panjang (*issuance cost*), pembayaran bunga hutang jangka panjang, pembayaran pph pasal 26 hutang jangka panjang, jurnal pajak tangguhan hutang jangka panjang, jurnal *accrual* terkait hutang jangka panjang, perhitungan dan pelunasan pokok hutang jangka panjang, akun-akun atas operasi LNG (aset LNG, penjualan, dan *working advance*), penyusunan laporan lalu lintas devisa, dan utang luar negeri untuk Bank Indonesia, alokasi biaya pinjaman ke anak perusahaan.

**i. *Senior Supervisor Long-term Liabilities Accounting***

Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penjurnalan, koreksi terhadap penjurnalan, penyusunan laporan akun, penyusunan *disclosure* laporan keuangan, penyusunan pedoman dan perbaikannya terkait pencatatan akun-akun hutang jangka panjang perusahaan (penerbitan instrumen hutang jangka panjang, biaya penerbitan hutang jangka panjang (*issuance cost*), pembayaran bunga hutang jangka panjang, pembayaran pph pasal 26 hutang jangka panjang, jurnal pajak tangguhan hutang jangka panjang, jurnal *accrual* terkait hutang jangka panjang dan pelunasan pokok hutang jangka panjang, analisa dan pembuatan laporan manajemen untuk pelaporan eksternal terkait dengan penyusunan laporan lalu lintas devisa,

dan utang luar negeri untuk Bank Indonesia, alokasi biaya pinjaman ke anak perusahaan.

**j. *Junior Analyst LNG Accounting***

Melakukan kegiatan perhitungan nilai aset, rekonsiliasi aset bersama asset holder, evaluasi dan menyusun rekomendasi terhadap usulan optimalisasi dan penghapusan *asset*, serta penyusunan laporan seluruh *asset* milik LNG, penjurnalan, koreksi terhadap penjurnalan, penyusunan laporan akun, penyusunan *disclosure* laporan keuangan, penyusunan monitoring aset, *working advance* dan penjualan LNG.

## **I.6 Kegiatan Lembaga**

### **I.6.1 Kegiatan Hulu**

Direktorat Hulu menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara (GMB), shale gas serta panas bumi termasuk mengusahakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa ring pemboran dan pendukungnya.

### **I.6.2 Hilir (Pengolahan, Pemasaran & Niaga dan Perkapalan)**

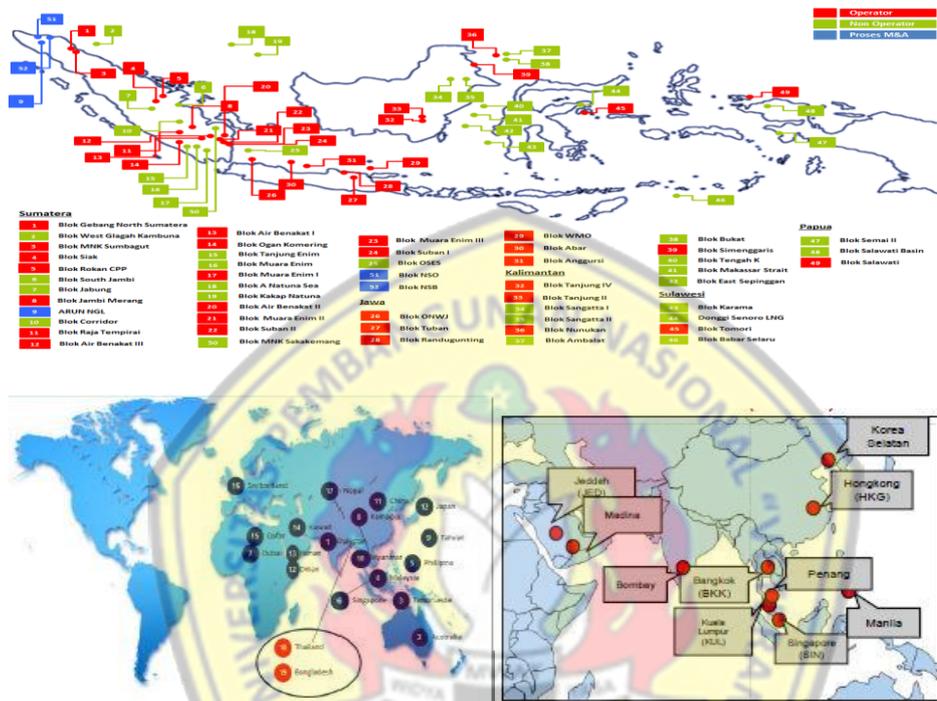
Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hilir meliputi bisnis Pengolahan, Pemasaran & Niaga, serta bisnis LNG. Bisnis Pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan.

### **I.6.3 Pengolahan**

Bisnis Pengolahan PERTAMINA memiliki dan mengoperasikan 6 (enam) buah unit Kilang dengan kapasitas total mencapai 1.046,70 Ribu Barrel. Beberapa kilang minyak seperti kilang UP-III Plaju dan Kilang UP-IV Cilacap terintegrasi dengan kilang Petrokimia, dan memproduksi produk-produk Petrokimia yaitu Purified Terephthalic Acid (PTA) dan Paraxylene.

Beberapa Kilang tersebut juga menghasilkan produk LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Mundu.

Di samping kilang minyak di atas, PERTAMINA memiliki 2 (dua) Operating Company, PT Arun LNG yang mengoperasikan kilang LNG di Arun dan PT Badak LNG yang mengoperasikan kilang LNG di Bontang.



Gambar 3: Wilayah Operasi Pertamina di Dalam maupun Luar Negeri

Wilayah bagian operasi untuk luar negeri terletak di daerah Libya, Qatar, Irak, Sudan, Malaysia, Australia dan Vietnam. Untuk wilayah operasi bagian dalam negeri Pertamina adalah tersebar dari Sabang hingga Merauke yang terbagi menjadi 8 Region.

Wilayah operasi Pertamina dibagi menjadi 8 wilayah operasi. Pembagian wilayah ini didasarkan region dari tiap daerah. Berikut adalah region yang tersebar :

1. Marketing Region 1 (Sumatera Bagian Utara).
2. Marketing Region 2 (Sumatera Bagian).
3. Marketing Region 3 (Jawa Bagian Barat).

4. Marketing Region 4 ( Jawa Bagian Tengah ).
5. Marketing Region 5 ( Jawa Timur, Bali Dan Nusa Tenggara ).
6. Marketing Region 6 ( Sulawesi Utara ).
7. Marketing Region 7 ( Sulawesi Selatan ).
8. Marketing Region 8 ( Maluku Dan Papua ).

## **I.7 Manfaat Peninjauan**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari peninjauan ini, diantaranya :

### **I.7.1 Manfaat Umum**

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai proses pengadaan barang/jasa di suatu perusahaan untuk suatu proyek pekerjaan tertentu dan bagaimana cara penentuan serta penyusunan harga perhitungan sendiri.

### **I.7.2 Manfaat Khusus**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan tentang pengadaan barang/jasa di dunia organisasi, khususnya pengadaan barang/jasa jika ada pekerjaan proyek dalam perusahaan dan penyusunan harga perhitungan sendiri yang sesuai dengan ketetapan manajemen perusahaan dan pengadaan barang/jasa tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk suatu proyek yang akan dikerjakan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagaimana proses pengadaan barang/jasa, metode pengadaan barang/jasa yang digunakan dan penyusunan harga perhitungan sendiri yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum.